JEaC: Journal of Education and Culture
Volume 6, No 2, Oktober 2026
EISSN : 29861012
Open Access: https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JEaC

PERAN KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI KTM MOROWALI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Pajriani[1], Mohamad Ikbal Kadir[2]
Universitas Bina Mandiri Gorontalo
Email : pajrianianhy863@gmail.com, mohamadikbalkadir@yahoo.co.id

Kata kunci:
kepala sekolah, pencegahan korupsi, budaya antikorupsi, kepemimpinan, sekolah luar biasa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah dalam pencegahan korupsi serta strategi yang diterapkan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Terpadu Mandiri (KTM) Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan guru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dalam pencegahan korupsi mencakup keteladanan integritas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pembentukan budaya organisasi antikorupsi, penguatan pengawasan internal, serta penegakan disiplin dan etika. Strategi yang diterapkan meliputi keteladanan kepemimpinan, transparansi pengelolaan anggaran, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan karakter, pengawasan partisipatif, serta penegakan aturan secara konsisten. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang berintegritas dan tata kelola yang akuntabel merupakan unsur penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk pada satuan pendidikan khusus.

Keywords :
school principal, corruption prevention, anti-corruption culture, leadership, special needs school.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the school principal in preventing corruption and the strategies implemented to develop an anti-corruption culture at the State Special Needs School of Kota Terpadu Mandiri (SLB Negeri KTM) Morowali. This research employed a descriptive qualitative approach using a case study design. Participants were selected through purposive sampling, consisting of the school principal, vice principal, treasurer, school committee members, and teachers. Data were collected through interviews, observations, and documentation, while data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, comprising data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the principal's role in corruption prevention encompasses integrity-based leadership, transparent and accountable financial management, the development of an anti-corruption organizational culture, strengthening internal supervision, and enforcing discipline and ethical standards. The strategies include leadership by example, budget transparency, the integration of anti-corruption values into character education, participatory supervision, and consistent enforcement of institutional regulations. This study emphasizes that integrity-driven leadership and accountable school governance are essential elements in establishing a transparent, responsible, and corruption-resistant

educational environment, particularly within special education institutions.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan sistemik yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pendidikan serta melemahkan nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi landasan pembentukan karakter peserta didik. Dalam lingkungan pendidikan, tindakan koruptif dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, pungutan yang tidak sesuai ketentuan, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi perlu menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan, bukan hanya melalui penegakan peraturan, tetapi juga melalui penguatan tata kelola kelembagaan dan pembentukan budaya integritas.

Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun karakter generasi muda yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus didukung oleh sistem pengelolaan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan maupun sumber daya pendidikan. Pencegahan korupsi di lingkungan sekolah juga perlu diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, keterbukaan informasi kepada warga sekolah, serta pelibatan komite sekolah dan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai yang diajarkan kepada peserta didik, tetapi juga harus tercermin dalam praktik manajemen dan perilaku seluruh unsur penyelenggara pendidikan.

Dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang bersih dan akuntabel, kepala sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting karena bertanggung jawab dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengawasi berbagai aktivitas kelembagaan. Kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan manajerial, tetapi juga berperan sebagai pemimpin moral yang menjadi teladan bagi guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat. Biddle (1986) menjelaskan bahwa peran berkaitan dengan harapan terhadap perilaku individu berdasarkan posisi yang ditempatinya dalam suatu struktur sosial. Dalam konteks pendidikan, kedudukan kepala sekolah mengandung tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta nilai-nilai etika. Oleh sebab itu, komitmen kepala sekolah terhadap integritas menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi di lingkungan sekolah.

Peran kepala sekolah dalam pencegahan korupsi dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, antara lain keteladanan dalam perilaku, transparansi pengelolaan keuangan, penguatan pengawasan internal, serta penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam budaya organisasi. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), misalnya, membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan peluang penyalahgunaan anggaran. Mauludi (2023) menguraikan bahwa penyalahgunaan dana BOS dapat terjadi melalui berbagai bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Sementara itu, Nugroho dan Fahmi (2022) menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam mendorong pencegahan tindak korupsi melalui penguatan visi, integritas, dan tata kelola

organisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan komitmen kepemimpinan dan sistem pengawasan yang berjalan secara konsisten.

Permasalahan tersebut memiliki relevansi tersendiri pada penyelenggaraan pendidikan khusus, terutama di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, SLB memiliki karakteristik pengelolaan yang membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan pembelajaran individual, ketersediaan sarana dan prasarana khusus, kompetensi tenaga pendidik, serta pemanfaatan sumber daya pendidikan secara tepat sasaran. Kompleksitas kebutuhan tersebut menuntut adanya tata kelola kelembagaan yang transparan dan bertanggung jawab agar seluruh sumber daya sekolah benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan peserta didik. Selain itu, nilai-nilai antikorupsi perlu ditanamkan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, prinsip integritas dan akuntabilitas harus diterapkan tidak hanya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, tetapi juga dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

SLB Negeri Kota Terpadu Mandiri (KTM) Morowali merupakan satuan pendidikan khusus yang menjadi konteks penelitian ini. Dalam penyelenggaraan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, dan pelayanan pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan anggaran sekolah, koordinasi dengan tenaga pendidik dan kependidikan, pelibatan komite sekolah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan kelembagaan. Karakteristik SLB yang memiliki kebutuhan layanan pendidikan khusus menjadikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas semakin penting. Kepala sekolah dituntut untuk mampu membangun mekanisme pengelolaan yang terbuka sekaligus menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah mengenai pentingnya menghindari perilaku koruptif dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas keterkaitan kepemimpinan kepala sekolah dengan akuntabilitas pengelolaan pendidikan dan pencegahan korupsi. Nugroho dan Fahmi (2022) mengkaji peran gaya kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pencegahan tindak korupsi di sekolah menengah pertama. Mauludi (2023) membahas bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan berdasarkan perspektif kriminologi. Selanjutnya, Munawaroh et al. (2024) menyoroti peran kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun ekosistem antikorupsi di era Society 5.0. Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan pemahaman mengenai pentingnya kepemimpinan, pengawasan, dan akuntabilitas dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pendidikan. Namun, pembahasan mengenai peran kepala sekolah dalam pencegahan korupsi pada konteks satuan pendidikan khusus, terutama SLB, masih perlu dikembangkan. Karakteristik peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan, dan kompleksitas pengelolaan sumber daya pada SLB menghadirkan konteks yang berbeda sehingga memerlukan kajian yang lebih spesifik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada peran kepala sekolah SLB Negeri KTM Morowali dalam pencegahan korupsi serta strategi yang diterapkan untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan sekolah. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi kepemimpinan, mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah, melibatkan warga sekolah dalam pengawasan, serta menanamkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kepemimpinan pendidikan, khususnya mengenai tata kelola sekolah yang berintegritas pada

satuan pendidikan khusus. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah, tenaga pendidik, komite sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran kepala sekolah dalam upaya pencegahan korupsi serta strategi yang diterapkan dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan SLB Negeri Kota Terpadu Mandiri (KTM) Morowali. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mengenai tindakan, kebijakan, pengalaman, dan interaksi para informan berdasarkan kondisi nyata di lingkungan sekolah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dengan SLB Negeri KTM Morowali sebagai lokasi sekaligus fokus kajian untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik kepemimpinan dan tata kelola sekolah dalam pencegahan korupsi.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan penelitian meliputi kepala sekolah sebagai informan utama, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah, serta guru pada jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif mengenai kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan keuangan, transparansi pelaksanaan program, pengawasan internal, dan penerapan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai peran kepala sekolah dalam menerapkan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta strategi pencegahan korupsi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas manajerial, mekanisme pengelolaan administrasi, pelaksanaan program sekolah, dan interaksi antarwarga sekolah yang berkaitan dengan penerapan budaya antikorupsi. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan, seperti rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), laporan pertanggungjawaban keuangan, dokumen pelaksanaan program sekolah, notulen rapat, serta dokumen lain yang mendukung fokus penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) (Miles et al., 2014) . Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tema untuk menggambarkan peran kepala sekolah serta strategi pencegahan korupsi yang diterapkan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul selama proses penelitian, kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara kesimpulan dan data yang diperoleh.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan guru. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi terhadap informasi atau fenomena yang sama. Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan deskripsi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peran kepala sekolah SLB Negeri KTM Morowali dalam pencegahan korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Kepala Sekolah dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan SLB Negeri KTM Morowali

Berdasarkan fokus penelitian, peran kepala sekolah dalam pencegahan korupsi di lingkungan SLB Negeri Kota Terpadu Mandiri (KTM) Morowali dapat dikaji melalui beberapa aspek, yaitu kepemimpinan yang berintegritas, pengelolaan keuangan yang transparan, pembentukan budaya organisasi antikorupsi, pengawasan internal, serta penegakan disiplin dan etika. Kelima aspek tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan dalam menciptakan tata kelola sekolah yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan.

Kepala Sekolah sebagai Teladan Integritas

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keterbukaan. Keteladanan tersebut diwujudkan melalui sikap dalam menjalankan tugas, pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan, serta interaksi dengan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan dapat membangun kepercayaan sekaligus mendorong terbentuknya lingkungan kerja yang menjunjung tinggi integritas.

Dalam konteks pencegahan korupsi, keteladanan kepala sekolah menjadi landasan penting untuk menghindari penyalahgunaan jabatan dan berbagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip etika kelembagaan. Sikap tersebut juga diharapkan dapat membangun kesadaran guru dan tenaga kependidikan bahwa setiap tugas harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan tanggung jawab profesional.

Kepala Sekolah sebagai Pengelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pencegahan korupsi di lingkungan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap sumber pendanaan dikelola sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tersebut mencakup proses perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pencatatan penggunaan dana, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Penerapan prinsip transparansi dapat dilakukan melalui pelibatan bendahara, guru, dan komite sekolah dalam pembahasan program serta perencanaan anggaran. Selain itu, setiap penggunaan dana perlu didukung oleh bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran menjadi instrumen penting untuk mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan warga sekolah terhadap pengelolaan kelembagaan.

Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Budaya Organisasi Antikorupsi

Pembentukan budaya antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga dengan pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sekolah. Kepala sekolah berperan mengembangkan lingkungan organisasi yang mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan.

Penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, pembiasaan harian, pengarahan kepada guru dan tenaga kependidikan, serta kegiatan pendidikan karakter. Dalam konteks pendidikan khusus, penanaman nilai antikorupsi perlu disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Nilai kejujuran,

misalnya, dapat diperkenalkan melalui pembiasaan berkata benar, mengembalikan barang yang bukan miliknya, bertanggung jawab terhadap tugas, dan menghargai hak orang lain.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi di SLB tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep korupsi, tetapi juga pada pembentukan perilaku positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Sekolah sebagai Penggerak Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas sekolah berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan program, pengelolaan administrasi, penggunaan anggaran, dan pemanfaatan fasilitas sekolah.

Pengawasan tersebut dapat melibatkan wakil kepala sekolah, bendahara, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah sesuai dengan tugas serta kewenangannya. Pelibatan berbagai unsur tersebut memungkinkan proses pengawasan berlangsung secara lebih partisipatif dan mengurangi ketergantungan terhadap pengawasan oleh satu pihak saja.

Selain pengawasan administratif, komunikasi terbuka juga diperlukan agar warga sekolah memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun laporan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas, potensi penyimpangan dapat diketahui lebih awal dan ditangani sesuai prosedur.

Kepala Sekolah sebagai Penegak Disiplin dan Etika

Pencegahan korupsi membutuhkan konsistensi dalam penerapan aturan dan standar perilaku organisasi. Kepala sekolah berperan memastikan bahwa seluruh warga sekolah memahami tugas, tanggung jawab, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan.

Penegakan disiplin dapat dilakukan melalui pembinaan, pengarahan, evaluasi kinerja, dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran serta peraturan yang berlaku. Kepala sekolah juga perlu membangun lingkungan kerja yang tidak membenarkan tindakan manipulatif, penyalahgunaan kewenangan, maupun penggunaan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi.

Melalui penerapan disiplin dan etika secara konsisten, nilai integritas diharapkan tidak hanya menjadi pedoman tertulis, tetapi juga menjadi bagian dari perilaku dan tanggung jawab seluruh warga sekolah.

Strategi Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Lingkungan SLB Negeri KTM Morowali

Pencegahan korupsi membutuhkan strategi yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan fokus penelitian, strategi kepala sekolah dalam membangun budaya antikorupsi dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk utama.

Penerapan Keteladanan dalam Kepemimpinan

Strategi keteladanan dilakukan dengan menjadikan kepala sekolah sebagai contoh dalam menerapkan nilai-nilai integritas. Kepala sekolah perlu menunjukkan perilaku jujur, terbuka, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangan. Keteladanan tersebut menjadi dasar dalam membangun hubungan kerja yang dilandasi kepercayaan dan profesionalisme.

Strategi ini juga menekankan pentingnya konsistensi antara kebijakan yang ditetapkan dengan tindakan yang dilakukan. Ketika kepala sekolah mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan, guru dan tenaga kependidikan memiliki contoh konkret mengenai penerapan nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan

Strategi berikutnya adalah membangun keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sekolah. Transparansi dapat diterapkan sejak proses perencanaan hingga pelaporan

penggunaan dana. Pelibatan bendahara, guru, dan komite sekolah dalam proses tersebut menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Keterbukaan informasi juga penting agar penggunaan anggaran dapat diketahui dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar kegiatan yang jelas dan didukung dokumen pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada pencapaian tujuan program pendidikan.

Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan Karakter

Strategi pendidikan karakter dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam proses pembelajaran dan kegiatan pembiasaan di sekolah. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian, kesederhanaan, keberanian, kerja keras, kemandirian, dan keadilan.

Pada satuan pendidikan khusus, penerapan pendidikan antikorupsi perlu memperhatikan karakteristik peserta didik. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran konkret, pembiasaan sederhana, media visual, simulasi, dan aktivitas sehari-hari agar nilai-nilai tersebut lebih mudah dipahami.

Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak harus selalu disampaikan melalui materi teoritis, tetapi dapat diwujudkan melalui pengalaman langsung yang membentuk kebiasaan positif peserta didik.

Penguatan Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan berbagai unsur sekolah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Kepala sekolah dapat mendorong keterlibatan guru, tenaga kependidikan, bendahara, dan komite sekolah dalam memantau pelaksanaan program serta penggunaan sumber daya.

Pengawasan dilakukan melalui evaluasi kegiatan, pemeriksaan dokumen administrasi, pembahasan laporan keuangan, dan komunikasi antarpihak. Mekanisme penyampaian pengaduan atau laporan juga dapat dikembangkan untuk memberikan ruang kepada warga sekolah dalam menyampaikan dugaan penyimpangan secara bertanggung jawab.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat memperkuat kontrol sosial dan mencegah terjadinya pemusatan kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Penegakan Aturan dan Penguatan Etika Organisasi

Strategi terakhir adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan dan aktivitas sekolah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kepala sekolah perlu memberikan pembinaan secara berkala mengenai tanggung jawab profesional, etika kerja, dan konsekuensi penyalahgunaan kewenangan.

Penegakan aturan harus dilaksanakan secara objektif tanpa membedakan kedudukan maupun hubungan personal. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan organisasi yang memiliki standar perilaku jelas serta membangun kesadaran bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

Peran Kepala Sekolah dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan SLB Negeri KTM Morowali

Peran kepala sekolah dalam pencegahan korupsi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kepemimpinan dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan. Kepala sekolah bukan hanya bertindak sebagai administrator, melainkan juga sebagai pengarah organisasi, pengambil keputusan, pengawas, dan teladan moral bagi seluruh warga sekolah.

Dalam konteks SLB Negeri KTM Morowali, tanggung jawab tersebut menjadi penting karena pengelolaan pendidikan khusus membutuhkan pemanfaatan sumber daya secara tepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Temuan mengenai pentingnya keteladanan kepala sekolah sejalan dengan teori peran yang dikemukakan Biddle (1986). Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang berkaitan dengan harapan dan tanggung jawab yang melekat pada kedudukan sosialnya. Kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi pendidikan diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma kelembagaan. Dengan demikian, keteladanan integritas bukan sekadar karakter pribadi, melainkan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan.

Dari aspek pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa perencanaan dan penggunaan dana didasarkan pada kebutuhan nyata sekolah serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana BOS, misalnya, harus dilaksanakan melalui prosedur perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mauludi (2023) menjelaskan bahwa penyalahgunaan dana BOS dapat terjadi melalui berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban merupakan langkah penting dalam memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.

Selain aspek administratif, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pada integritas. Budaya antikorupsi perlu diwujudkan melalui pembiasaan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Munawaroh et al. (2024) mengenai pentingnya peran kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun ekosistem antikorupsi. Ekosistem tersebut tidak hanya terbentuk melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui lingkungan organisasi yang mendukung penerapan nilai-nilai integritas dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam konteks pendidikan khusus, pembentukan budaya antikorupsi memiliki dimensi yang lebih luas karena harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan antikorupsi tidak seharusnya dibatasi pada pemahaman mengenai tindak pidana korupsi, tetapi perlu diarahkan pada pembentukan perilaku dasar, seperti berkata jujur, menghargai hak orang lain, bertanggung jawab, dan menaati aturan. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam pembelajaran dan budaya sekolah melalui pendekatan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik.

Dengan demikian, peran kepala sekolah dalam pencegahan korupsi mencakup dimensi moral, manajerial, edukatif, dan pengawasan. Keempat dimensi tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu agar pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi berkembang menjadi budaya kelembagaan yang melekat dalam seluruh aktivitas sekolah.

Strategi Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Lingkungan SLB Negeri KTM Morowali

Strategi kepala sekolah dalam membangun budaya antikorupsi perlu diarahkan pada pembentukan sistem organisasi yang mampu mendorong perilaku berintegritas sekaligus mencegah munculnya peluang penyimpangan. Strategi tersebut tidak cukup dilakukan melalui penyampaian imbauan atau sosialisasi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, keteladanan, pengawasan, dan pembiasaan yang dilaksanakan secara konsisten.

Strategi keteladanan kepemimpinan merupakan langkah mendasar dalam membangun budaya antikorupsi. Kepala sekolah harus menjadi figur yang memperlihatkan kesesuaian antara nilai yang disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Apabila kepala

sekolah mengutamakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab, nilai tersebut dapat menjadi standar perilaku bagi seluruh warga sekolah. Pemikiran ini sejalan dengan Nugroho dan Fahmi (2022), yang menjelaskan pentingnya gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam mendorong pencegahan tindak korupsi di lingkungan pendidikan. Kepemimpinan yang memiliki arah dan komitmen terhadap integritas dapat menjadi dasar dalam membangun organisasi sekolah yang berorientasi pada tata kelola yang baik.

Strategi transparansi pengelolaan keuangan juga memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi. Keterbukaan anggaran memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan memahami proses perencanaan dan penggunaan sumber daya sekolah. Transparansi perlu diterapkan melalui penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan, pencatatan transaksi secara tertib, penyimpanan bukti pengeluaran, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelibatan komite sekolah juga dapat memperkuat pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran.

Strategi pendidikan karakter merupakan aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian. Pendidikan antikorupsi pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemahaman mengenai larangan melakukan korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Munawaroh et al. (2024) menekankan pentingnya membangun ekosistem sekolah yang mendukung perilaku jujur, bertanggung jawab, dan beretika. Dalam penyelenggaraan pendidikan khusus, strategi ini dapat diterapkan melalui metode pembelajaran yang konkret, sederhana, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan nilai integritas sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Penguatan pengawasan partisipatif juga menjadi strategi penting karena pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi terbuka dengan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pengawas pendidikan agar setiap kegiatan dapat dipantau secara objektif. Hasan dan Junesco (2023) menekankan pentingnya upaya sekolah dalam mencegah praktik korupsi melalui penguatan pengawasan dan keterlibatan unsur-unsur kelembagaan. Partisipasi tersebut dapat memperkuat akuntabilitas serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang tidak terdeteksi.

Di samping itu, penegakan aturan dan etika organisasi harus menjadi bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan. Setiap warga sekolah perlu memahami bahwa pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangan harus sesuai dengan peraturan. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan bahwa pelanggaran ditangani secara proporsional melalui mekanisme pembinaan, evaluasi, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan. Penegakan aturan yang konsisten dapat mencegah terbentuknya budaya pembiaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, strategi kepala sekolah dalam membangun budaya antikorupsi perlu mengintegrasikan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural diwujudkan melalui transparansi pengelolaan keuangan, pengawasan internal, pembagian tanggung jawab, dan penegakan aturan. Sementara itu, pendekatan kultural dilakukan melalui keteladanan kepemimpinan, pendidikan karakter, dan pembiasaan nilai-nilai integritas. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah SLB Negeri Kota Terpadu Mandiri (KTM) Morowali memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi melalui keteladanan integritas, pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel, pembentukan budaya organisasi antikorupsi, penguatan pengawasan internal, serta penegakan disiplin dan etika. Strategi yang diperlukan untuk membangun budaya antikorupsi meliputi penerapan kepemimpinan yang berintegritas, keterbukaan pengelolaan anggaran, penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui pendidikan karakter, pelibatan warga sekolah dalam pengawasan, serta penerapan aturan secara konsisten. Keberhasilan upaya tersebut membutuhkan komitmen berkelanjutan dari kepala sekolah dan partisipasi seluruh warga sekolah agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi bagian dari budaya kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan, peningkatan pengawasan, dan pembinaan etika perlu terus dikembangkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan khusus yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pemenuhan hak peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Hasan, Z., & Junesco, D. (2024). Upaya sekolah dalam mencegah praktik korupsi di dunia pendidikan. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 1*(4), 25–33. https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.237

Mauludi, D. R. (2023). Bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana BOS oleh tenaga kependidikan di lingkungan sekolah berdasarkan perspektif kriminologi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 12*(1), 119–143. https://doi.org/10.24252/ad.vi.38157

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Munawaroh, S., Nailufar, R., & Nabilah, S. (2023). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun ekosistem anti korupsi di era Society 5.0. *Gunung Djati Conference Series, 36*. https://doi.org/10.15575/gdcs.v36i.2005

Nugroho, S. D., & Fahmi, I. (2022). Peran gaya kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pencegahan tindak korupsi di sekolah menengah pertama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8*(16), 530–538. https://doi.org/10.5281/zenodo.7068064